



Lesson Learned

Proses Pembelajaran dari Program Kota Tanpa Kumuh
di Kabupaten Kotawaringin Timur



Platform Kolaborasi Sebagai
Pilar Keberhasilan Penanganan
Kumuh

PROGRAM
KOTAKU | KOTA
TANPA
KUMUH

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Made with VISME



ABOUT PROGRAM KOTAKU

Program peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan

TUJUAN

1. Menurunnya luas permukiman kumuh;
2. Mewujudkan kolaborasi penanganan Kawasan kumuh dari berbagai stakeholder;
3. Menyediakan infrastruktur permukiman;

SASARAN

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan (a.l drainase; air bersih/minum; pengelolaan persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran; Ruang Terbuka Publik);
2. Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik;
3. Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh.

Platform Kolaborasi Sebagai Pilar Keberhasilan Penanganan Kumuh



Sejak Program Kotaku diluncurkan pertama kali, salah satu kesadaran yang dibangun dalam upaya penanganan kumuh adalah terjalannya kolaborasi para pihak. Sejak awalpun sudah dibangun kesadaran jika penanganan kumuh tidak bisa dibebankan kepada program Kotaku saja. Meskipun implementasinya tersedia Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM), namun jumlahnya tidak signifikan untuk menyelesaikan persoalan kumuh di sebuah wilayah tanpa peran pemerintah daerah maupun swasta.

Upaya penanganan kumuh juga semakin pesimis penyelesaiannya. Pandemi covid 19 yang tak kunjung usai telah melumpuhkan kegiatan ekonomi dan sektor-sektor lainnya. Namun pada akhir tahun 2021 corona mulai mereda dan menjadi awal kebangkitan kegiatan pembangunan, tidak terkecuali kegiatan pembangunan infrastruktur yang didalamnya juga terdapat upaya penanganan kumuh. Hal ini terjadi juga dalam kegiatan kolaborasi penanganan kumuh di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Kotawaringin Timur.

Di kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah mulai dilakukan kegiatan perkerasan jalan. Kelurahan Ketapang termasuk dalam wilayah penangan kumuh dan pendampingan Program Kotaku di Kota Sampit. Wilayah ini terletak di perbatasan antara perkotaan dan desa di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Dengan Jumlah penduduk sebanyak 10.679 Jiwa dengan 2950 KK dengan jumlah 56 RT dengan 8 RW.

Dilaksanakannya pembangunan infrastruktur di berbagai titik/jalan pada tiap RT yang ada di kelurahan Ketapang menjadi suatu manfaat bagi warga, khususnya manfaat warga untuk keluar dari kondisi kumuh di lingkungannya. Selain kegiatan perkerasan jalan kegiatan kolaborasi lainnya untuk menyelesaikan persoalan kumuh di wilayah ini adalah kegiatan pembangunan rabat beton/semenisasi, drainase/selokan dan pengaspalan jalan. Selain pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan, tidak ketinggalan juga dari segi aspek air bersih dilaksanakan yang dimanfaatkan oleh masyarakat di Kelurahan Ketapang. Pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur selain kegiatan tersebut mampu membantu masyarakat menyelesaikan persoalan kumuh, kegiatan tersebut secara nilai ekonomi juga membantu masyarakat. Terlebih pasca pandemi covid 19 yang telah mematikan kegiatan ekonomi masyarakat. Pembangunan tersebut mempekerjakan tenaga kerja yang berasal dari sekitar wilayah kegiatan pembangunan. Dengan adanya pembangunan tadi secara tidak langsung juga membantu program pemerintah dalam pemulihan ekonomi pasca bencana covid 19.

LKM SAWAHAN MADANI MENUNJUKKAN KEMANDIRIAN DENGAN BERKOLABORASI



Kelurahan Sawahan adalah salah satu kelurahan kategori kumuh yang masuk dalam SK Kumuh Bupati kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017. Seiring waktu Kelurahan Sawahan sudah keluar dari zona permukiman kumuh. Dalam perhitungan angka pengurangan kumuh, Kelurahan Sawahan angka kumuhnya sudah 0 kumuh.

Pencapaian itu sepadan dengan upaya yang dilakukan oleh masyarakat di sana untuk keluar dari kekumuhan. Masyarakat di sana melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sawahan Madani sudah mengawali upaya tersebut sejak tahun 2017. Pada tahun tersebut pemerintah pusat lewat kegiatan Program Kotaku mengalokasikan Bantuan Dana Investasi (BDI) sebesar Rp 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang digunakan untuk pembangunan hidran umum di RT003-RW001 dan pembangunan drainase di RT001- RW001.

Sadar bahwa untuk menyelesaikan persoalan kumuh tidak bisa hanya mengandalkan dana BDI dari pemerintah pusat, BKM Sawahan Madani mulai melangkah untuk mengupayakan pendanaan dari sumber lain untuk penyelesaian persoalan kumuh di wilayahnya. Gayung bersambut dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2018. Untuk membanru masyarakat keluar dari persoalan kumuh DLH Kotawaringin Timur menyediakan motor sampah. Dengan tersedianya motor sampah di Kelurahan Sawahan memberikan kontribusi pengurangan angka kumuh dari aspek persampahan.

Tidak berhenti sampai di situ. Perubahan kepengurusan BKM tahun 2019 lebih memberikan darah segar semangat untuk lebih banyak lagi melakukan kolaborasi. Koordinator BKM Sawahan Madani berganti Jainudin Karim digantikan Koter Susanto semakin semangat baru untuk menjalin kolaborasi. Selain kegiatan rutin BKM seperti pertemuan Forum LKM ada juga Forum Kolaborasi, Kegiatan Rapat Rutin LKM dan Kegiatan Dana Bergulir, tahun ini BKM Sawahan Madani mampu berkolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur. Kegiatan yang dikolaborasikan adalah Pembangunan Septictank Komunal untuk membantu masyarakat menyelesaikan persoalan sanitasi. Adapun lokasi sasaran pembangunan septictank untuk memberikan fasilitas sanitasi warga yang berada di RT020 RW008, RT039 RW014, RT036 RW014, RT037 RW014, RT030 RW011, RT001 RW001 dan RT027 RW009. Jumlah Kepala keluarga (KK) yang menjadi penerima manfaat kegiatan pembangunan septicanak komunal ini mencapai 69 KK.

Upaya yang dilakukan BKM Sawahan Madani patut dicontoh dan apresiasi. Dengan keaktifan anggotanya BKM Kelurahan sawahan mampu menunjukkan kinerjanya untuk memfasilitasi masyarakat keluar dari persoalan kumuh. Namun demikian, keaktifan BKM tidak berarti apa Ketika tidak ada peran aktif masyarakat. Peran aktif masyarakat bisa dilakukan dengan ikut terlibat aktif menyampaikan usulan kegiatan melalui kegiatan Musrenbang Kelurahan. Selanjutnya peran aktif masyarakat tetap diperlukan, yaitu dalam menjaga asset-aset yang sudah terbangun agar tetap terpelihara dan termanfaatkan. Jangan sampai infrastruktur yang dibangun dengan biaya yang besar tersebut akan bernasib hanya sekedar menjadi monument belaka. (Vina Fasos 2019)



KPP Karya Utama Golden Merawat dan Memanfaatkan dengan Kebersamaan

Selain faktor kualitas konstruksi yang dihasilkan, faktor-faktor penting yang mempengaruhi keberlanjutan fungsi suatu infrastruktur agar melampaui dari umur rencana adalah pengelolaan. Pengelolaan yang dimaksud adalah kegiatan operasional pemanfaatan dan pemeliharaan (O & P).

Tidak mudah menanamkan kesadaran masyarakat untuk merawat infrastruktur yang sudah dibangun. Seringkali kita jumpai infrastruktur yang dibangun dengan biaya yang tidak sedikit tersebut tidak dimanfaatkan dan tidak dirawat dengan dengan baik. Kegagalan membangun kesadaran terhadap parasana yang sudah dibangun sama saja telah membuang dana pembangunan secara percuma.

Namun, tidak demikian dengan yang terjadi di salah satu wilayah dampingan Program Kotaku di Kabupaten kotawaringin Timur ini. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Karya Utama Golden adalah salah satunya. Melalui semangat kebersamaan, kelompok ini menyelenggarakan kegiatan O & P yang berlokasi di Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur. Kelompok ini melakukan kegiatan O & P pada infrastruktur hidran air dan infrastruktur untuk mandi cuci dan kakus (MCK) yang dibangun oleh Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Kelompok ini beranggotakan 33 orang yang hampir 60% anggotanya merupakan penduduk kurang mampu dan tidak memiliki MCK.

Kesadaran kebersamaan kelompok ini sudah terbangun sejak tahun 2017. Anggota KPP Karya Utama memanfaatkan air dari hidran yang sudah dibangun Program Kotaku dengan iuran rutin sebesar Rp 25.000,-. Dana ini dipergunakan untuk biaya operasional dan pemeliharaan hidran dan MCK. Iuran rutin bulanan ini juga disepakati dengan metode subsidi silang. Maksudnya adalah setiap anggota membantu anggota yang lain yang belum bisa memenuhi kewajiban iuran rutin sebesar Rp 25.000 tersebut.

Cara seperti itu cukup efektif untuk menjaga moral anggota yang kurang mampu sehingga tidak merasa inferior. Di sisi lain cara seperti itu juga sebagai upaya membangun kesadaran warga lainnya yang mempunyai kelebihan untuk berbagi. Melalui kesadaran *take and give* yang sudah terbangun kelompok tersebut sudah mampu menyelesaikan berbagai kendala dalam kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan sarana hidran dan MCK. Hal itu terbukti saat terjadi kerusakan pompa hidran pada tahun 2021. Perbaikan mesin pompa mampu dibiayai sendiri dari kas yang selama ini terkumpul dengan saldo Rp 7.250.000,-. Satu hal lagi patut diapresiasi dari KPP Karya Utama Golden adalah prinsip transparansi kelompok.

Mereka secara rutin melakukan pertemuan bulanan. Dalam pertemuan ini semua hal yang berkaitan dengan kegiatan KPP ini. **(Amel, Fasek)**



Lesson

Learned

KPP SEBAGAI UJUNG TOMBAK KEBERLANJUTAN PENANGANAN KUMUH DI KELURAHAN SAWAHAN

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung "Gerakan 100-0-100", yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak.

Program ini sudah berjalan di kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2016. Pada tahun 2017 Kelurahan Sawahan mendapatkan Bantuan Dana investasi (BDI) untuk penyelesaian persoalan kumuh di kelurahan ini. Salah satu implementasi BDI Program Kotaku adalah untuk pembangunan hidran umum bertempat di RT005-RW00. Sampai saat ini bangunan masih berfungsi dan memberikan manfaat bagi warga masyarakat setempat. Hal ini tidak lepas juga berkat kepengurusan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP).

Edi selaku ketua KPP mempunyai peran yang besar dalam mengaktifkan anggotanya dalam melakukan kegiatan operasional dan pemeliharaan (O & P). Secara maksimal KPP yang diketuainya secara maksimal melakukan peran dan fungsinya. Kegiatan rutin yang mereka lakukan adalah melakukan perawatan dan pengecekan kualitas air. Selain itu untuk menopang biaya operasional hidran umum ini pemanfaat juga dikenakan iuran. Tugas anggota KPP lainnya adalah mengumpulkan iuran masyarakat guna menjaga bersama bangunan Hidran Umum di lokasi RT005 ini tetap berfungsi dan bermanfaat.

Setiap bulan sekali dilakukan pengecekan kualitas air baik dari tandon air di hidran umum dan kualitas air yang sudah disalurkan ke masyarakat oleh anggota KPP. Hal ini dilakukan guna memastikan kualitas air yang dialirkan masih dalam kualitas baik (tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa). Tidak hanya hal itu, mereka memastikan peralatan elektronik seperti solar panel, mesin pompa dan alat kelistrikan lainnya dalam performa yang baik juga.

Tidak jarang ada beberapa komponen mesin pompa juga mengalami kerusakan. Tetapi berkat pengelolaan KPP yang baik mesin tersebut bisa diatasi dengan memanfaatkan dana iuran masyarakat yang dikumpulkan oleh anggota KPP. Hal seperti ini yang perlu dilakukan terus menerus agar bangunan Hidran Umum ini masih bisa dirasakan manfaatnya dalam waktu yang lama dan berkelanjutan. Apa yang dilakukan oleh keanggotaan KPP ini patut diapresiasi di tengah stigma negative terhadap infrastruktur atau fasilitas umum yang telah di bangun. Stigma yang dimaksud adalah seringnya terdengar kabar infrastruktur yang dibangun dengan biaya mahal, namun mubadzir pada akhirnya. Bangunan yang megah hanya sekedar menjadi monument tanpa di manfaatkan karena tidak adanya kelompok peduli yang melakukan kegiatan operasional dan pemeliharaan di sana. Memang berat untuk melakukan hal ini tanpa didasari kesadaran merasa memiliki infrastruktur yang telah di bangun.

(Vina, Fasos 2019)



KEBERHASILAN UPK DESA BENGKUANG MAKMUR KELOLA DANA BERGULIR, PATUT DICONTOH

LKM sumber Makmur Desa Bangkuang Makmur Kecamatan MB Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan lokasi dampingan dalam program KOTAKU. Unit Pengelola Keuangan (UPK) di desa ini di kelola oleh Ibu Rasidah dan Ibu Qomariah, yang bertugas mengelola dana bergulir. UPK Mandiri merupakan tempat bagi masyarakat dalam mendapatkan penambahan modal, dengan cara pemanfaatan pinjaman dana bergulir. Dengan jasa pinjaman yang ditentukan di dalam rapat bersama LKM, UPK, dan KSM, dan pinjaman yang dibayar sistem angsuran dengan masa waktu antara 10 bulan sampai dengan 12 bulan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing kelompok. Dengan pemanfaatan pinjaman bergulir ini masyarakat bisa mendapat tambahan modal usaha untuk pengembangan usaha yang sedang di jalankan, memperoleh keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan.

Dana Bergulir pada UPK Mandiri telah disalurkan pada banyak anggota KSM. Tingkat pengembalian pun lancar. Dengan sistem pembayaran pada saat melaksanakan kegiatan rutin bulanan seperti arisan yang telah ditentukan tanggal setiap bulannya, sehingga dapat menghindari keterlambatan pembayaran angsuran.



Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran maka UPK akan mengkonfirmasi pada KSM untuk mengetahui permasalahan dan alasan terjadinya keterlambatan pembayaran. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran maka UPK akan mengkonfirmasi pada KSM untuk mengetahui permasalahan dan alasan terjadinya keterlambatan pembayaran. Kegiatan Ekonomi Bergulir yang dikelola oleh UPK ini dapat berjalan dengan baik karena dukungan dan pemahaman tupoksi dari berbagai pelaku, mulai dari KSM, UPK, LKM, maupun dari pihak-pihak lain, dengan tetap melalui proses awal dari pembentukan KSM, sesuai dengan SOP dan pencairan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian serta kelayakan usaha.

Salah satu KSM yang mengajukan pinjaman adalah KSM Mawar. KSM ini beranggotakan 7 orang dan diketuai oleh Ibu Marlinawati, kelompok ini mampu mengembangkan usaha dari jahit menjahit dan sekarang telah bertambah jenis usaha lainnya yaitu usaha dagang aneka kuliner (makanan dan kue), Dengan adanya bantuan penambahan modal dari dana bergulir sejak tahun 2019 tentu sangat membantu sekali untuk pengembangan usaha mereka, yang semakin maju dan mampu mensejahterakan anggotanya. Pada tahun 2019, pencairan dilakukan bulan Juli, dengan total modal awal Rp.7,5 juta untuk KSM Mawar (5 orang) tingkat pengembaliannya mencapai 100%. Pada Agustus 2020, KSM Mawar kembali mengajukan pinjaman dana bergulir dengan pinjaman modal meningkat senilai Rp. 14 juta (7 orang) dan disalurkan pada bulan September 2020.

Lesson

Learned

Mengais Rejeki Ditengah Pandemi UPK LANCAR Kelurahan Sawahan

Pandemi covid 19 telah meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan. Pandemic ini juga telah menimbulkan terjadinya gejala sosial. Tidak hanya saja di bidang kesehatan tetapi juga di bidang ekonomi. Hal ini juga dirasakan oleh masyarakat Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Di tengah pesimisme masyarakat yang didera pandemic berkepanjangan ini selalu ada masyarakat yang terus memelihara harapan hidupnya, bahkan selalu mengambil hikmah di balik suatu peristiwa atau kejadian. Di balik dampak negatif yang di timbulkan karena pandemi orang-orang akan berusaha dengan sekuat tenaga dan pikiran mereka untuk menghasilkan pundi-pundi rezeki, begitu pula dengan sekelompok masyarakat yang ada di Kota Sampit.

Program Kotaku, selain melakukan upaya untuk penyelesaian persoalan kumuh, program ini juga memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan usaha sebagai sumber penghidupannya. Secara konseptual program ini meyakini jika penanganan kumuh akan lebih efektif jika dalam pelaksanaannya juga memerhatikan kegiatan-kegiatan yang memiliki daya ungkit ekonomi kawasan. Oleh karena itu strategi penanganan kumuh dalam program KOTAKU mengalami pergeseran yaitu dari yang sifatnya "penanganan" prasarana dan sarana dasar permukiman, menuju pada pengarusutamaan "pengentasan", atau yang lazim disebutnya "dari penyediaan infrastruktur dasar di permukiman kumuh eksisting, stop the bleeding, menjadi fokus kepada upaya menangani kumuh eksisting dan mencegah kumuh baru dimasa mendatang melalui pendekatan urban housing and settlement system. Dengan Kondisi yang saat ini yang mengharuskan physical distancing dan pembatasan kegiatan membuat kondisi perekonomian masyarakat menjadi tidak menentu.





Banyak orang berpikir mencari peluang lain untuk bertahan hidup sehari-hari. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lancar dengan anggotanya mencoba menekuni hobi yang ternyata memang memiliki peluang yang sangat besar dalam hal mencari penghasilan tambahan.

Bermodalkan ketrampilan menjahit, dan bisa membaca pangsa pasar membuat KSM Lancar memulai usaha Pembuatan masker. Dan ternyata semakin banyak pemesannya. Sampai dengan saat ini KSM Lancar telah melayani pemesanan mencapai 1900 piece (lembar) dari beberapa pemesan. Instansi atau perusahaan yang telah menggunakan masker buatan KSM ini adalah Perusahaan Sawit PT. Mustika Sembuluh 800 piece, Galery Batik Kameluh 800 piece serta pemesanan perorangan kurang lebih 300 piece.

KSM Lancar Kelurahan Sawahan mampu menunjukkan walaupun di masa Pandemi COVID 19 kita masih bisa berkarya secara mandiri. meskipun dalam suasana pandemic. (Amelia Teresia: Sampit, 15 Mei 2020)

Operasi Pungut Sampah Sarana Edukasi Kebersihan di Kelurahan Mentawa Baru Hilir

Salah satu masalah terbesar terjadinya lingkungan kumuh adalah belum terbangunnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan bersih. Sudah banyak sarana maupun prasarana sudah dibangun untuk menyelesaikan persoalan kumuh. Namun demikian, seolah persoalan ini tidak kunjung selesai, tapi malah semakin menjadi-jadi.

Guna membangun kesadaran masyarakat untuk berpola hidup bersih dan sehat BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Kelurahan Mentawa baru Hilir Kecamatan Mentawa baru Ketapang kabupaten Kotawaringin Timur melakukan edukasi kepada para pelajar agar selalu peduli terhadap sampah. Kegiatan ini bekerja sama dengan pemerintah Kelurahan Mentawa Baru Hilir.

Sementara edukasi pola hidup bersih dan sehat ini mengambil lokasi di kompleks Masjid Nurul Iman Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Dalam kegiatan tersebut diikuti oleh ratusan pelajar dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) sederajat lingkup Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Dalam kesempatan tersebut hadir unsur Muspida kabupaten, Muspika Kecamatan dan sangat mengapresiasi kegiatan ini sebagai bentuk edukasi terhadap para pelajar agar selalu peduli terhadap lingkungan bersih dari sampah, sehingga lingkungan mereka jadi nyaman dan indah. Edukasi ini diharapkan bisa membawa pribadi para pelajar untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungannya.

Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memberikan contoh kepada seluruh elemen masyarakat akan betapa pentingnya menjaga kebersihan. "Mudah-mudahan ini bisa menjadi budaya bagi anak-anak untuk selalu menjaga kebersihan. dan tentunya jadi contoh yang baik bagi masyarakat" ungkap Maya Annisa Lestari yang merupakan Lurah Mentawa Baru Hilir.

Dalam kegiatan tersebut setidaknya ada 20 sekolah berpartisipasi dengan jumlah keterlibatan pelajar mencapai 200 orang lebih. Mereka melakukan pungut sampah di areal Masjid Nurul Iman, Jalan Kopi Selatan dan juga Jalan Pelita Timur. Masing-masing kelompok pelajar membawa karung untuk menampung sampah tersebut.

Tidak hanya itu, adanya kegiatan ini juga menjadi sebuah cara agar masyarakat lebih menjadi malu. Karena pelajar saja yang masih anak-anak peduli terhadap sampah. *(Nico, Fasos 2020)*



PERTEMUAN BULANAN, UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS MANDIRI BKM DAN UP



Kapasitas pelaku dalam program KOTAKU memiliki peran yang sangat penting di masyarakat. Karena itu peningkatan kapasitas dirasa perlu agar tercapainya tujuan program secara maksimal. LKM, UPK, KSM, dan KPP merupakan pelaku-pelaku yang berperan sebagai penggerak jalannya program baik itu bidang Infrastruktur, Ekonomi, ataupun Sosial. Dengan pemahaman yang di miliki oleh para pelaku ini mengantar pada perubahan perilaku kolektif dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman juga memiliki amanah untuk peduli dan fokus terhadap masalah dan persoalan masyarakat di desa/kelurahan.

Ada 11 Lokasi Dampingan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Para Pelaku se Kecamatan ini menggagas untuk mengadakan Penguatan Kapasitas Pelaku secara swadaya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai manajemen keuangan dan pengelolaan aset-aset program. *Output*-nya, diharapkan para pelaku LKM, UPK, KSM, dan KPP dapat melaksanakan kegiatan infrastruktur dengan kualitas baik serta mampu untuk mengelola Manajemen Keuangan (MK) kegiatan-kegiatan program secara transparan, akuntabilitas dan mandiri. Hal ini di dukung pula oleh pemerintah desa/kelurahan dengan positif. Sebagai pemateri dan Nara sumber adalah Askod CD Mandiri bapak Yogi Surwiatmoko, Koordinator LKM Sawahan Madani Bapak Koter, dan Ketua UPK Putri Lenggana Ibu Rafiah, para nara sumber dan pemateri ini telah dikenal sudah memahami Program KOTAKU dengan baik. Masyarakat sebagai pelaku program mengikuti kegiatan ini dengan semangat sekalipun dengan fasilitas yang ala kadarnya di berbagai tempat seperti rumah warga dan saung/pondok di kebun milik warga.

Setelah penguatan ini di harapkan masyarakat mampu melaksanakan kegiatan insfrastruktur, memelihara aset infrastruktur yang telah dibangun, dan mengembangkan aset dana modal secara transparant, akuntabilitas dan mandiri.

PIM Sebagai Instrumen Mitigasi Permasalahan Pelaksanaan Program Kotaku di Kotawaringin Timur

Untuk memastikan bahwa Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) bisa berjalan dengan baik dan efisien, maka aspek Pengelolaan Informasi dan Masalah (PIM) menempati peranan yang signifikan. PIM sebagai salah satu metode pemantauan dan evaluasi program serta sarana pengaduan memiliki tujuan untuk meminimalkan risiko berupa penyimpangan atau pelanggaran prosedur yang dapat menghambat penyelenggaraan dan pencapaian keberhasilan program.

Pencegahan dapat dilakukan dengan mengenali risiko dan mitigasi di setiap tahapan program, sehingga para pelaku program dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu. Agar pengaduan dapat berfungsi sebagai alat mitigasi/pencegahan dan penanganan masalah, maka para pelaku program harus menyediakan media dan saluran pengaduan yang mudah dan nyaman untuk dijangkau masyarakat luas serta melakukan sosialisasi dan penguatan kapasitas pelaku dalam menjangkau pengaduan. Pada prinsipnya siapa saja berhak menyampaikan pengaduan (permintaan informasi, penyampaian saran, kritik, keluhan, laporan, dan sejenisnya) yang terkait dengan penanganan kumuh.

Inovasi pengembangan sosialisasi PIM di masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain melalui sosialisasi kepada masyarakat melalui pertemuan-pertemuan, pemasangan akses PIM melalui papan informasi proyek di setiap kegiatan pembangunan, dan melalui spanduk atau X-baner. Selain itu sebagai pengembangan untuk lebih mempermudah masyarakat mengakses layanan PIM dilakukan juga melalui pengintegrasian link Kotaku ke website pemerintah kota/kabupaten dan penambahan nomor pengaduan BKM setempat.

Program Kotaku telah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Dinas Kominfo agar Informasi dan layanan Pengaduan tentang Program Kotaku dapat diakses langsung melalui website atau portal resmi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Jadi dengan sekali klik ke portal kotimkab.go.id kita akan langsung bisa mendapatkan ikon Program Kotaku yang sudah terintegrasi menjadi satu bagian ke dalam portal resmi pemerintah setempat. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya maupun menyampaikan pengaduan terkait Program Kotaku.



Sosialisasi program KOTAKU

Fasilitator kelurahan melaksanakan kegiatan sosialisasi Program Kotaku secara menerus bila ada moment yang tepat yang bisa diselipkan dengan agenda Kelurahan, atau pertemuan masyarakat lainnya di kelurahan Sawahan, dengan melibatkan LKM Sawahan Madani, UPL, UPS, UPK dan masyarakat sekitar kelurahan Sawahan. Sosialisasi ini juga dihadiri oleh Lurah dan staff kelurahan Sawahan.

Pelaksanaan sosialisasi ini bertujuan untuk memberitahukan masyarakat sekitar tentang kegiatan program KOTAKU yang akan dilaksanakan ditahun 2019. Untuk kelurahan Sawahan tahun anggaran 2019, tidak mendapatkan bantuan dana BPM (Bantuan Pemerintah untuk masyarakat) dari Program KOTAKU, tapi dari Program KOTAKU masih bisa mendampingi LKM dan Pemerintahan.

Kelurahan untuk berkolaborasi ke Pihak ketiga untuk mendapatkan pendanaan Infrastruktur maupun pendanaan lainnya yang bersifat untuk Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Peningkatan Ekonomi dan kegiatan lainnya. untuk itu diperlukan kegiatan sosialisasi sebagai tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut. Pertama fasilitator memberikan sosialisasi tentang pemahaman kegiatan Kolaborasi apa saja yang akan dilaksanakan di kelurahan Sawahan.



Selain itu dilakukan juga sosialisasi rebug warga untuk menjelaskan Desain dan RAB sebagai lampiran dari Proposal kegiatan yang akan di Kolaborasikan yang sudah dibahas bersama dengan LKM, dan pihak kelurahan yang selanjutnya hasil tersebut dapat disampaikan kepada masyarakat.

Kegiatan Kolaborasi ini menitik beratkan lebih kepada mengurangi Kumuh di wilayah Kelurahan tersebut. Dengan terealisasinya kegiatan Kolaborasi ini diharapkan untuk kelurahan Sawahan status kekumuhannya bisa mencapai 0% Kumuh. Dan juga diharapkan dengan adanya kegiatan Sosialisasi ini masyarakat dapat mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan Yang akan dilaksanakan di Kelurahan Sawahan. Selain itu dalam kegiatan sosialisasi ini juga Fasilitator membahas tentang dokumen RPLP dan Perencanaan Kegiatan yang diluar SK Kumuh. Untuk dapat dituangkan di dokumen RPLP Kelurahan Sawahan yang selain memuat usulan-usulan prioritas di Musrenbang Kelurahan yang dimasukkan kedalam Dokumen Perencanaan Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP).